

PEMBERDAYAAN PETANI RAWA GAMBUT BERBASIS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DI DESA BUKIT RAWI KALIMANTAN TENGAH

Nyai Ratu Kalabien Andau Dadie¹, Eka Nor Taufik², Tri Prajawahyudo³,
Eti Dewi Nopembereni⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
e-mail: ¹rtukalabien@gmail.com

Diterima: 3 Juli 2026; Revisi: 28 Agustus 2026; Disetujui: 30 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the actual condition of farmer groups, identify the internal and external factors of empowerment, and formulate empowerment strategies through the role of farmer groups in the peatland swamp area of Bukit Rawi Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. The study employed a qualitative approach using thematic analysis (Braun & Clarke, 2013) and interpretive descriptive analysis, through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing (Sugiyono, 2023). Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving 12 purposively selected informants, including farmer group members, village officials, and agricultural extension workers (PPL). The results show that the three core functions of farmer groups as learning classes, cooperation platforms, and production units have not yet operated optimally or in an integrated manner. The greatest strength lies in social capital, namely the strong farming spirit and the local knowledge of the Dayak community regarding peatland management; however, this strength has not been institutionally managed. This study formulates four integrated strategies: (1) building a collective learning system that does not depend on a single figure; (2) revitalizing leadership and group cooperation mechanisms; (3) optimizing the role of production units through partnerships with BUMDes; and (4) strengthening coordination with external institutions for the ecological adaptation of peatland. A conceptual model of empowerment based on institutional integration is produced as the main contribution of this study, serving as a practical reference for village governments, agricultural extension workers, and BUMDes.

Keywords: farmer empowerment, farmer groups, institutional integration, peatland, thematic analysis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual kelompok tani, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pemberdayaan, serta merumuskan strategi pemberdayaan melalui peran kelompok tani di wilayah rawa gambut Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik (Braun & Clarke, 2013) dan analisis deskriptif interpretatif, melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi petani anggota kelompok tani, aparat desa, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi pokok kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi belum berjalan secara optimal dan terpadu. Kekuatan terbesar terletak pada modal sosial berupa semangat bertani yang kuat dan pengetahuan lokal masyarakat Dayak tentang pengelolaan gambut, namun kekuatan ini belum dikelola secara kelembagaan. Penelitian ini merumuskan empat strategi terpadu: (1) membangun sistem pembelajaran kolektif yang tidak bergantung pada figur tunggal; (2)

merevitalisasi kepemimpinan dan mekanisme kerja sama kelompok; (3) mengoptimalkan peran unit produksi melalui kemitraan dengan BUMDes; dan (4) memperkuat koordinasi dengan lembaga eksternal untuk adaptasi ekologis lahan gambut. Model konseptual pemberdayaan berbasis integrasi kelembagaan dihasilkan sebagai kontribusi utama penelitian ini, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah desa, PPL, dan BUMDes.

Kata kunci: analisis tematik, integrasi kelembagaan, kelompok tani, lahan rawa gambut, pemberdayaan petani

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem penting secara global karena kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar, mengatur tata air, serta menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal. Selain memiliki fungsi ekologis yang penting, lahan gambut juga menjadi sumber daya alam yang mendukung ketahanan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan sekitarnya (Utami et al., 2021). Namun demikian, lahan gambut tergolong sebagai ekosistem yang sangat rentan terhadap degradasi, terutama akibat praktik drainase, pembukaan lahan tanpa pengendalian hidrologi, serta kebakaran hutan.

Peningkatan intensitas degradasi pada lahan gambut ditandai oleh perubahan tutupan lahan, pembangunan sistem drainase buatan dan perubahan kondisi iklim. Pembangunan sistem drainase menciptakan umpan balik yang mempercepat degradasi lahan gambut. Drainase menurunkan muka air tanah sehingga gambut menjadi lebih kering dan rentan terhadap kebakaran. Selanjutnya, kombinasi antara drainase dan kebakaran semakin mengurangi ketersediaan air tanah, yang pada akhirnya menyebabkan neraca air menjadi semakin defisit. Lahan gambut pascakebakaran juga memiliki kapasitas menyimpan air yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan gambut yang tidak mengalami kebakaran (Gunawan et al., 2020). Berbagai kajian menegaskan bahwa degradasi gambut tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut (Purnomo et al., 2024).

Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan gambut berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologi dan pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting dalam pembangunan pertanian di wilayah gambut. Integrasi kedua aspek tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis lahan gambut sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Melalui pemberdayaan yang berbasis kelembagaan, petani tidak hanya didorong untuk mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan, tetapi juga diperkuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan organisasi. Dengan demikian, pembangunan pertanian di wilayah gambut dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Zulkarnaini & Lubis, 2018).

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah dengan hamparan lahan gambut yang luas dan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran. Kabupaten Pulang Pisau sebagai bagian dari wilayah tersebut kerap dihadapkan pada tantangan pengelolaan gambut yang kompleks. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencatat bahwa pada tahun 2023 total luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 165.896,45 ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, n.d.). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yaitu 45.701,12 ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, n.d.). Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah Pulang Pisau memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi, khususnya pada kawasan yang

didominasi lahan rawa gambut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dan restorasi gambut sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal serta keberadaan kelembagaan petani yang mampu mengorganisir tindakan kolektif (Darsani et al., 2021; Yeny et al., 2022).

Desa Bukit Rawi dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempresentasikan wilayah rawa gambut dengan tingkat kerentanan ekologis dan ekonomi yang tinggi, sekaligus memiliki kelembagaan kelompok tani yang sudah terbentuk namun belum berfungsi optimal, sehingga relevan untuk mengkaji strategi pemberdayaan berbasis kelembagaan. Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, merupakan wilayah yang didominasi ekosistem rawa gambut dengan luas lahan gambut mencapai 4.692,59 ha dari total wilayah 15.461,98 ha (Sinta & Angkusumiu, 2025). Desa ini dihuni oleh 1.037 jiwa yang mayoritas merupakan masyarakat lokal Dayak dengan struktur mata pencaharian berbasis sumber daya alam. Data perkembangan desa menunjukkan masih terdapat 69 keluarga prasejahtera dengan pendapatan rata-rata kepala keluarga sekitar Rp1.250.000 per bulan, mencerminkan kerentanan ekonomi rumah tangga petani di wilayah gambut. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kelembagaan ekonomi desa. Hasil pertanian dan hortikultura belum dipasarkan secara terorganisir melalui kelompok tani, sedangkan mekanisme pemasaran formal masih terbatas.

Berbagai penelitian menegaskan bahwa kelompok tani memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi usahatani, memperkuat akses terhadap teknologi, modal, dan pasar, serta menjadi sarana pembelajaran sosial bagi petani di wilayah dengan keterbatasan ekologis (Purnomo et al., 2024). Namun di lapangan, kelompok tani di Desa Bukit Rawi belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi secara efektif. Kajian Darsani et al. (2021) menunjukkan adopsi teknologi pengelolaan gambut masih menghadapi hambatan teknis dan sosial, termasuk lemahnya pendampingan kelembagaan. Sementara itu, Yeny et al. (2022) menyoroti bahwa keberhasilan program berbasis gambut sangat bergantung pada penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait bagaimana strategi pemberdayaan petani melalui kelompok tani dapat dirancang secara efektif dalam konteks desa rawa gambut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi aktual kelompok tani di wilayah rawa gambut Desa Bukit Rawi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung maupun penghambat proses pemberdayaan petani; dan (3) merumuskan strategi pemberdayaan petani melalui peran kelompok tani yang kontekstual sesuai karakteristik wilayah rawa gambut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan strategi pemberdayaan petani di ekosistem gambut tropik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif (Braun & Clarke, 2013; Sugiyono, 2023). Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengacu pada Sugiyono (2023), dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik ekologi rawa gambut yang dominan serta terdapat kelompok tani aktif yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2026.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Dari tujuh kelompok tani yang ada di Desa Bukit Rawi, penelitian difokuskan pada dua kelompok tani yang

aktif bergerak di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yakni Kelompok Tani Mandiri I dan Kelompok Tani Kompak Jaya.

Kedua kelompok tersebut dipilih secara *purposive* karena memenuhi kriteria kelompok tani yang masih aktif, yaitu masih melaksanakan kegiatan kelompok, mengusahakan komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai dengan fokus penelitian, serta direkomendasikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai kelompok yang masih aktif dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pertanian.

Informan petani dipilih berdasarkan kriteria: (1) masih menetap dan berdomisili di Desa Bukit Rawi; (2) aktif mengolah lahan rawa gambut untuk kegiatan usahatani; dan (3) telah menjalankan kegiatan bertani dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan dinamika pertanian lahan gambut di wilayah tersebut.

Total informan berjumlah 12 orang, terdiri atas 10 orang petani anggota kelompok tani (masing-masing 5 orang dari setiap kelompok tani), 1 orang aparat desa, dan 1 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jumlah informan tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip keterwakilan sumber informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu petani sebagai pelaku utama, aparat desa sebagai pihak yang memahami kondisi kelembagaan desa, dan PPL sebagai pendamping kelompok tani. Penentuan jumlah ini juga mempertimbangkan prinsip kecukupan informasi dalam penelitian kualitatif, di mana jumlah informan dianggap memadai apabila data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*) yaitu kondisi ketika penambahan informan tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan (Sugiyono, 2023). Selama proses pengumpulan data, informasi yang diperoleh dari informan ke 10 hingga ke 12 menunjukkan pola jawaban yang berulang dan tidak lagi memunculkan tema baru, sehingga jumlah 12 informan dianggap telah mencapai kejenuhan data yang memadai untuk menjawab tujuan penelitian.

Tabel 1. Sebaran Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Kelompok Tani	Jumlah	Alasan Pemilihan
1.	Anggota Kelompok Tani Mandiri I	Mandiri I	5 Orang	Aktif bertani hortikultura di lahan gambut
2.	Anggota Kelompok Tani Kompak Jaya	Kompak Jaya	5 Orang	Aktif bertani padi dan hortikultura di lahan gambut
3.	Aparat Desa		1 Orang	Memahami kondisi desa dan kelompok tani
4.	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)		1 Orang	Pendamping dan fasilitator pemberdayaan kelompok tani
Total Informan			12 Orang	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara terbuka, direkam menggunakan perekam suara untuk memastikan akurasi data. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi terkait kondisi kelembagaan kelompok tani, strategi pemberdayaan yang telah dan sedang berjalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada setiap informan dan meminta persetujuan mereka untuk berpartisipasi secara sukarela. Peneliti juga meminta izin kepada informan sebelum melakukan perekaman wawancara serta saat pengambilan dokumentasi. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, nama informan tidak dicantumkan dalam penyajian hasil penelitian dan diganti dengan kode informan atau inisial.

Kedua, observasi non-partisipan terhadap kegiatan kelompok tani dan aktivitas pertanian di lahan gambut. Peneliti melakukan pengamatan langsung tanpa terlibat aktif dalam kegiatan yang diamati, dengan fokus pada proses interaksi antar anggota kelompok tani, pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan, kondisi lingkungan pertanian, serta praktik pengelolaan lahan rawa gambut di lokasi penelitian. Observasi ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung atas konteks lapangan sekaligus mengonfirmasi konsistensi antara informasi yang disampaikan informan dengan kondisi aktual di lapangan. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kelompok tani, seperti struktur organisasi, catatan kegiatan, profil desa, serta dokumen pendukung dari pemerintah desa. Dokumentasi juga mencakup foto kegiatan dan catatan lapangan yang diperoleh selama proses penelitian. Data dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara dan observasi, sekaligus untuk memperkuat dan memvalidasi data primer yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Model analisis interaktif (Sugiyono, 2023) digunakan sebagai kerangka umum analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara yang telah ditranskripsikan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2013).

Proses analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mentranskripsikan hasil wawancara, membaca data secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, memberikan kode awal (*initial coding*), mengelompokkan kode-kode yang memiliki makna serupa, menetapkan tema utama, meninjau kembali kesesuaian tema dengan keseluruhan data, serta menyusun interpretasi berdasarkan tujuan penelitian.

Kode-kode yang memiliki keterkaitan makna kemudian disintesis menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan pola-pola pemberdayaan petani melalui kelompok tani. Tema-tema tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemberdayaan petani dan menyusun model konseptual pemberdayaan berbasis integrasi kelembagaan.

Untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2023) dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari tiga sumber berbeda yaitu petani, aparat desa, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi lapangan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, memiliki luas wilayah 15.461,98 ha yang didominasi oleh ekosistem rawa gambut seluas 4.692,59 ha (Sinta & Angkumiu, 2025). Penduduk desa berjumlah 1.037 jiwa dengan 229 orang bermata pencaharian utama sebagai petani, pekebun, dan nelayan. Penelitian ini berfokus pada dua kelompok tani aktif di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yakni Kelompok Tani Kompak Jaya (didirikan 2006, komoditas padi, 19 anggota) dan Kelompok Tani Mandiri I (didirikan Tahun 2023, komoditas hortikultura, 17 anggota). Kedua kelompok tani tergolong dalam kelas kemampuan pemula, mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan masih menjadi kebutuhan utama.

Tema 1: Pembelajaran Kolektif dari Ketergantungan Menuju Kemandirian Belajar

Analisis tematik terhadap data wawancara mengungkap bahwa proses pembelajaran dalam kelompok tani di Desa Bukit Rawi berlangsung melalui berbagai jalur, yaitu jalur formal melalui

penyuluhan PPL, jalur informal melalui pertemuan kelompok dan kearifan lokal, serta jalur mandiri melalui media digital. Namun keberlangsungan seluruh jalur pembelajaran ini sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu keaktifan PPL dan keaktifan kepengurusan kelompok. Keberhasilan evaluasi peningkatan kelas kemampuan kelompok dipengaruhi oleh peran motivasional PPL dalam menstimulasi masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial untuk terlibat dalam proses perubahan, PPL juga memiliki hubungan sebagai edukator untuk keberhasilan dalam meningkatkan kelas kelompok tani (Gultom et al., 2024).

Ketika PPL aktif berkunjung secara rutin, bahkan seminggu sekali, aktivitas belajar kelompok berlangsung secara intensif dan berbasis lapangan, sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan (Bapak S, 63 tahun), aktivitas belajar kelompok berlangsung secara intensif dan berbasis lapangan.

"Kalau dulu ada Bu PPL namanya Bu Wartiani. Beliau sering ke sini untuk mengajarkan semua kegiatan pertanian dari dasarnya." (Informan P2, wawancara, 24 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketika pendampingan PPL berjalan aktif, proses pembelajaran kelompok dapat berlangsung intensif dan berbasis pengalaman langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembelajaran kelompok selama ini bertumpu pada keberadaan satu figur, bukan pada sistem atau mekanisme kelompok yang melembaga. Namun kondisi ini tidak bertahan; PPL lama pensiun, ketua kelompok berganti, dan seluruh mekanisme belajar kolektif ikut terhenti. Temuan ini sejalan dengan konsep *communities of practice* (Wenger, 1998) di mana keberlanjutan belajar kolektif mensyaratkan adanya keterlibatan (*engagement*) yang terlembagakan dalam komunitas, bukan bergantung pada satu figur otoritas. Pembelajaran dalam kelompok memungkinkan petani belajar dengan petani lainnya sebagai upaya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan ini petani belajar secara sistematis untuk menyelesaikan masalah bersama, tanpa bergantung pada protokol tunggal dari luar (Amanah & Seminar, 2022). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amanah & Seminar (2022) yang menunjukkan bahwa pembelajaran antar petani menjadi sarana penting dalam peningkatan kapasitas petani. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa di wilayah rawa gambut, pembelajaran kolektif tidak hanya berasal dari interaksi antar petani, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan pengetahuan lokal masyarakat Dayak dan pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar mandiri. Di balik kelemahan ini, terdapat dua potensi besar yang belum dikelola secara optimal. Pertama, pemanfaatan media digital di mana seorang informan (Bapak A, 48 tahun) mengaku sebagian besar pengetahuannya tentang pengelolaan sawah gambut diperoleh secara mandiri melalui *YouTube*. Kedua, pengetahuan lokal masyarakat Dayak mencakup pemilihan waktu tanam, pemilihan komoditas, hingga teknik pengelolaan lahan secara tradisional yang telah teruji lintas generasi. Kedua potensi ini merupakan modal yang belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam sistem pembelajaran kelompok. Kondisi ini mempertegas kebutuhan akan transformasi dari model belajar yang bergantung pada figur tunggal menuju sistem pembelajaran kolektif yang mandiri dan kontekstual mengintegrasikan penyuluhan formal, kearifan lokal Dayak, dan pemanfaatan media digital sebagai satu ekosistem belajar yang saling melengkapi.

Tema 2: Kepemimpinan dan Kelembagaan Kekosongan yang Melemahkan Kolektivitas

Temuan paling konsisten yang muncul di seluruh dimensi penelitian ini adalah peran sentral ketua kelompok sebagai penggerak utama seluruh aktivitas kolektif. Ketika ketua aktif, forum berjalan, bantuan terdistribusi, dan kerja sama berlangsung. Ketika ketua tidak aktif atau pindah domisili, seluruh mekanisme tersebut lumpuh secara bersamaan. Hal ini terlihat pada kegiatan gotong royong, menurut salah satu informan (Ibu L, 61 tahun) mengungkapkan bahwa kegiatan gotong royong pernah berjalan aktif, *"kalau dulu sama-sama."* (Informan P4, wawancara, 24 Februari 2026), namun kini tidak

lagi berlangsung sejak ketua kelompok tidak lagi aktif. Temuan ini menegaskan bahwa masalah bukan pada hilangnya kepercayaan antar anggota, melainkan pada absennya mekanisme yang mengaktivasi kepercayaan tersebut ke dalam tindakan kolektif. Hal ini sejalan dengan argumen Ostrom (2015) dalam teori *collective action* bahwa pengelolaan sumber daya bersama hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat aturan kolektif yang disepakati dan kepemimpinan yang mampu menegakkan norma-norma tersebut. Dalam perspektif teori sumber daya bersama, pentingnya pengakuan terhadap aturan-aturan lokal serta keterlibatan aktif komunitas dalam setiap tahapan pengambilan keputusan merupakan syarat utama agar keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dapat terwujud secara adil (Suwarno et al., 2015). Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Pagala et al. (2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya kepemimpinan dan manajemen kelembagaan menyebabkan fungsi kelompok tani tidak berjalan secara optimal. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pada wilayah rawa gambut, ketidakaktifan ketua kelompok tidak hanya berdampak pada menurunnya partisipasi anggota, tetapi juga menyebabkan program dan fasilitas eksternal yang dirancang untuk kelompok tani tidak lagi dikelola melalui mekanisme kelembagaan kelompok. Absennya pemimpin aktif di kelompok tani Desa Bukit Rawi merupakan manifestasi dari kegagalan desain kelembagaan yang terlalu personal dan belum terlembagakan. Kondisi ini tampak pada infrastruktur sumur bor dari Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dirancang sebagai fasilitas kolektif kelompok tani, namun kenyataannya dikelola di luar kerangka kelompok oleh Ketua RT dan tidak menjangkau seluruh anggota kelompok secara merata. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dengan realitas kelembagaan di lapangan, program eksternal yang seharusnya memperkuat kelompok justru terputus dari kelompok karena kelompok sendiri tidak aktif.

Tema 3: Produksi Kolektif Potensi Besar di Balik Usahatani yang Masih Individual

Kegiatan produksi pertanian di Desa Bukit Rawi masih berjalan secara individual. Masing-masing petani mengelola lahannya sendiri tanpa koordinasi produksi yang berarti dalam kelompok. Teknologi pertanian yang pernah diterima seperti *hand traktor* dan *drone* penabur pupuk belum dimanfaatkan secara optimal sebagai aset kolektif. Akses terhadap pasar juga masih sangat terbatas; satu-satunya mekanisme pemasaran yang masih berjalan adalah penjualan informal melalui grup *WhatsApp* dan *Facebook* sebagai sebuah bentuk kerja sama yang lahir secara organik dari kebutuhan nyata anggota, bukan dari program kelompok. Ibu T (60) selaku anggota aktif Kelompok Tani Mandiri I menyampaikan bagaimana anggota kelompok memasarkan hasil panen mereka:

"Kalau di sini diposting saja melalui grup *WhatsApp* atau *Facebook*. Jadi pemasarannya lewat grup. Nanti kalau ada yang memesan, tinggal dijualkan atau diletakkan di bawah. Begitulah cara pemasarannya." (Informan P5, wawancara, 24 Februari 2026).

Meskipun tidak terstruktur dalam kerangka program kelompok tani secara resmi, hal ini menunjukkan bahwa semangat kerja sama di antara anggota sesungguhnya masih ada dan dapat diaktifkan jika ada kebutuhan bersama yang jelas. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafira & Sulmi (2022) yang menunjukkan bahwa kelompok tani berperan dalam meningkatkan kegiatan usahatani melalui penguatan kerja sama antar anggota. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun fungsi produksi kelompok belum berjalan secara terorganisasi, bentuk kerja sama informal dalam pemasaran hasil panen tetap berkembang berdasarkan kebutuhan nyata anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa modal sosial dan semangat kolektivitas masih dimiliki petani, tetapi belum terintegrasi ke dalam mekanisme kelembagaan kelompok tani secara formal. Di balik keterbatasan tersebut, terdapat potensi yang signifikan. Pertama, semangat bertani anggota tetap kuat meskipun kelembagaan melemah. Kedua, diversifikasi komoditas sudah berjalan secara alami dari padi, sayur-mayuran, hingga buah-buahan hortikultura. Ketiga, kehadiran BUMDes yang aktif mengelola jagung manis dan program *corporate social responsibility* (CSR)

brigade pangan merupakan jembatan potensial bagi petani untuk mengakses modal dan pasar yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Famuji (2024) transformasi dari pola subsisten menuju agribisnis hanya dapat terjadi apabila ada penguatan kapasitas manajemen usaha yang terorganisasi melalui kelembagaan kolektif.

Tema 4: Adaptasi Ekologis dan Dukungan Eksternal Konteks Gambut yang Tak Bisa Diabaikan

Karakteristik khas ekologi rawa gambut, seperti banjir musiman, pH tanah yang asam, ketergantungan tinggi pada kapur dolomit dan pupuk, serta ancaman kebakaran pada musim kemarau, bukan sekadar menjadi hambatan produksi, tetapi juga menghambat mobilitas dan koordinasi kelompok. Salah satu informan (Ibu L, 60 tahun) menggambarkan bagaimana banjir yang merendam jalan utama membuat anggota tidak dapat keluar rumah, motor dan mobil tidak dapat bergerak, sehingga pertemuan kelompok pun tidak dapat diselenggarakan.

"Cuman banjir itu saja soalnya kalau jalan itu banjir kan gabisa keluar kami soalnya ini, jalan itu jalan utama jadi banjir nutup jalan semua dan itu dalam banget kan gambut ya jadi banjir itu buat mobil mogok, motor susah jalan, itu merugikan ya." (Informan P4, wawancara, 24 Februari 2026)

Kondisi ekologis ini secara langsung memperkuat argumentasi perlunya pendekatan pemberdayaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah gambut. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudrajat et al. (2025) yang menunjukkan bahwa karakteristik hidrologi lahan gambut menuntut adanya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan pertanian. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kondisi ekologis lahan gambut tidak hanya memengaruhi aspek budidaya, tetapi juga berdampak langsung terhadap mobilitas petani, keberlangsungan pertemuan kelompok, serta efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan demikian, faktor ekologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kelembagaan kelompok tani. Mengingat kompleksnya tantangan ekologis tersebut, kelompok tani tidak dapat mengandalkan kapasitas internal semata, sehingga keterlibatan dan dukungan dari lembaga eksternal menjadi krusial. Berbagai lembaga eksternal telah hadir di desa seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan sumur bor, Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan pengendalian kebakaran, program *corporate social responsibility* (CSR) dengan brigade pangan, namun program-program tersebut berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu kerangka penguatan kelembagaan kelompok tani. Kondisi ini sejalan dengan konsep *adaptive co-management* dari Olsson et al. (2004) yang menekankan pentingnya sinergi antara pengetahuan lokal petani dengan dukungan teknis dari pihak eksternal dalam mengelola ekosistem yang kompleks. Tanpa koordinasi yang terintegratif, setiap program eksternal hanya memberikan dampak parsial dan tidak berkontribusi pada penguatan kelembagaan petani secara keseluruhan.

Sintesis dari Model Konseptual Pemberdayaan Berbasis Integrasi Kelembagaan

Keempat tema di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling memperkuat. Analisis tematik menunjukkan bahwa ketidakaktifan kepengurusan merupakan akar permasalahan yang menghambat ketiga peran kelompok tani sekaligus tanpa kepemimpinan aktif, forum belajar tidak berjalan, kerja sama tidak teraktivasi, dan optimalisasi produksi tidak dapat dikoordinasikan. Sebaliknya, ketika pembelajaran kolektif menguat, ia mendorong munculnya kepemimpinan yang lebih responsif, yang pada gilirannya mampu mengorganisir produksi kolektif dan menarik partisipasi dukungan eksternal.

Selain hubungan tersebut, model ini juga memperlihatkan adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang menghubungkan *output* model yakni kelembagaan petani yang kuat dan terintegrasi kembali dengan keempat komponen pembentuknya. Artinya, ketika kelembagaan petani

mulai menguat, proses ini secara bersamaan turut memperdalam kapasitas belajar, meningkatkan kualitas kepemimpinan, memperluas jaringan produksi, dan memperkuat daya adaptasi ekologis anggota.

Dinamika sirkular inilah yang menjadikan model ini bersifat transformatif dan berkelanjutan, bukan sekadar kerangka linier yang berhenti pada satu titik akhir. Berdasarkan sintesis keempat tema tersebut, penelitian ini merumuskan model konseptual pemberdayaan petani lahan rawa gambut berbasis integrasi kelembagaan. Model ini menggambarkan hubungan integratif antara penguatan pembelajaran kolektif, revitalisasi kepemimpinan dan kelembagaan, pengembangan produksi kolektif, serta integrasi adaptasi ekologis dan dukungan eksternal yang secara bersama-sama bermuara pada terwujudnya kelembagaan petani yang kuat dan terintegrasi, dengan indikator: sistem belajar mandiri, kelompok tani aktif, produksi mulai kolektif, dan jaringan eksternal terhubung. Model ini berbeda dari pendekatan pemberdayaan konvensional yang cenderung bersifat parsial dan sektoral.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pada wilayah rawa gambut tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga memerlukan integrasi pembelajaran kolektif, kepemimpinan kelompok, adaptasi terhadap karakteristik ekologis gambut, serta sinergi dengan berbagai lembaga eksternal. Temuan ini memperluas pandangan Famuji (2024) yang menekankan bahwa pemberdayaan bermakna hanya terwujud apabila intervensi dilakukan secara terpadu tidak sebatas pada penguatan kapasitas manajemen usaha dan dimensi produksi, tetapi juga dimensi pengetahuan, kelembagaan, dan ekologi secara simultan.

Dengan demikian, model ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan strategi pemberdayaan petani di lahan-lahan marginal, khususnya rawa gambut tropis, sekaligus menjadi sintesis akhir dari seluruh temuan penelitian yang menjawab pertanyaan bagaimana strategi pemberdayaan petani melalui peran kelompok tani dapat dirumuskan secara komprehensif di wilayah rawa gambut Desa Bukit Rawi. Untuk memperjelas hubungan antara pembelajaran kolektif, kepemimpinan kelembagaan, produksi kolektif, serta adaptasi ekologis dan dukungan eksternal, model konseptual pemberdayaan petani rawa gambut berbasis integrasi kelembagaan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Konseptual Model konseptual Pemberdayaan Petani Rawa Gambut Berbasis Integrasi Kelembagaan

Sumber: Hasil olahan penulis, 2026

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani melalui kelompok tani di wilayah rawa gambut Desa Bukit Rawi belum berjalan optimal karena fungsi kelompok sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi belum terintegrasi secara berkelanjutan. Faktor internal yang menghambat proses pemberdayaan meliputi lemahnya kelembagaan kelompok dan ketergantungan pada figur tunggal (PPL dan ketua kelompok), sedangkan faktor eksternal penghambat tampak dari belum terintegrasinya program dan lembaga pendukung seperti BRG, MPA, dan CSR ke dalam kerangka kelembagaan kelompok tani. Di sisi lain, faktor internal pendukung ditemukan berupa modal sosial masyarakat, semangat bertani, dan pengetahuan lokal masyarakat Dayak dalam pengelolaan lahan gambut, sementara faktor eksternal pendukung tercermin dari kehadiran BUMDes dan berbagai lembaga eksternal yang berpotensi menjadi jembatan akses modal, pasar, dan pengetahuan apabila dikelola secara terintegrasi. Kondisi ini menjadi dasar bagi penguatan pemberdayaan petani melalui strategi berbasis integrasi kelembagaan.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan model pemberdayaan petani lahan rawa gambut berbasis integrasi kelembagaan yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu penguatan pembelajaran kolektif oleh PPL dan pemerintah desa melalui pendampingan rutin yang tidak bergantung pada satu petugas, revitalisasi kepemimpinan dan kelembagaan kelompok tani oleh pemerintah desa bersama pengurus melalui mekanisme regenerasi kepengurusan, pengembangan produksi kolektif oleh BUMDes melalui fasilitasi kemitraan pemasaran dan pengelolaan bersama aset kelompok, serta integrasi adaptasi ekologis dan dukungan eksternal oleh pemerintah desa melalui forum koordinasi lintas lembaga bersama BRG, MPA, dan CSR. Model ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan petani lahan rawa gambut. Untuk mendukung implementasinya, sinergi antara pemerintah desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), BUMDes, dan berbagai lembaga eksternal perlu diperkuat guna mewujudkan pemberdayaan petani yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., & Seminar, A. U. (2022). Sekolah lapang petani sebagai community of practice pengembangan inovasi kelompok di era digital. *Jurnal Penyuluhan*, 18(01), 164–176. <https://doi.org/10.25015/18202240307>
- Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful qualitative research*. SAGE Publications Inc.
- Darsani, R. Y., Sulaeman, Y., & Masganti. (2021). Persepsi petani terhadap teknologi “panca kelola” di lahan rawa bekas terbakar (kasus lahan gambut bekas terbakar Desa Talio Hulu Kecamatan Padih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal: Ziraa’ah: Majalah Ilmiah Pertanian*, 46(3), 408–418. <https://doi.org/10.31602/zmip.v46i3.408418>
- Famuji, U. (2024). *Strategi pemberdayaan petani kentang untuk meningkatkan kesejahteraan petani* [Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri]. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/25985>
- Gultom, D. T., Nikmatullah, D., Syarief, Y. A., & Pratiwi, R. C. (2024). Kompetensi penyuluh pertanian lapangan dalam peningkatan kelas kelompok tani. *Jurnal Penyuluhan*, 20(02), 349–359. <https://doi.org/10.25015/20202451110>

- Gunawan, H., Afriyanti, D., Humam, I. A., Nugraha, F. C., Wetadewi, R. I., Surayah, L., Nugroho, A., & Antonius, S. (2020). Peatland management without burning: Alternative restoration efforts in (re)wet peatlands. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 10(4), 668–678. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.668-678>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). *Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi)*. Diakses 3 Februari 2026. <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/>
- Olsson, P., Folke, C., & Berkes, F. (2004). Adaptive comanagement for building resilience in social-ecological systems. *Environmental Management*, 34(1), 75–90. <https://doi.org/10.1007/s00267-003-0101-7>
- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pagala, Y. A. M., Nurdyah, S. N., & Saleh, M. (2023). Peran Dan Fungsi Kelembagaan Kelompok Tani Kakao Di Polewali Mandar. *Agrovital: Jurnal Ilmu Pertanian*, 8(2), 39–76. <https://doi.org/10.35329/agrovital.v8i2.3976>
- Purnomo, H., Puspitaloka, D., Okarda, B., Andrianto, A., Qomar, N., Sutikno, S., Muhammad, A., Basuki, I., Jalil, A., Yesi, Prasetyo, P., Tarsono, Zulkardi, Kusumadewi, S. D., Komarudin, H., Dermawan, A., & Brady, M. A. (2024). Community-based fire prevention and peatland restoration in Indonesia: A participatory action research approach. *Environmental Development*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.100971>
- Sinta, K. E., & Angkusumiu. (2025). *Profil Desa Bukit Rawi Tahun Anggaran 2025 [Laporan desa]*. Pemerintah Desa Bukit Rawi.
- Sudrajat, J., Gusmayanti, E., Nusantara, R. W., & Sawerah, S. (2025). Farming sustainability in peatlands following restoration programme in west kalimantan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 31(1), 83–91. <https://doi.org/10.18343/jipi.31.1.83>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (2nd ed., Vol. 5). ALFABETA.
- Suwarno, E., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Soedomo, S. (2015). Penggunaan konsep rules-in-use ostrom dalam analisis peraturan pembentukan organisasi kesatuan pengelolaan hutan (the use of ostrom's concept on rules-in-use in the analysis of regulation of forest management unit formation). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.13-26>
- Syafira, N., & Sulmi. (2022). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani Kakao Di Desa Boo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. The role of farmer groups in increasing cocoa farming income in bobo village palolo sub District sigi district. *J. Agrotekbis*, 10(6), 1004–1011.
- Utami, R. W., Kartini, K., & Akbar, A. A. (2021). Pengaruh keragaman penggunaan lahan di ekosistem gambut sub DAS kapuas kabupaten kubu raya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 409–421. <https://doi.org/10.14710/jil.19.2.409-421>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Yeny, I., Karlina, E., Garsetiasih, R., & Sawitri, R. (2022). Strategi pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan di areal eks PLG kalimantan tengah (The utilization strategies of sustainability peatlands in ex PLG Areas, central kalimantan). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 18(2), 79–91. <https://doi.org/10.20886/jpht.2022.18.2.79-91>
- Zulkarnaini, & Lubis, E. (2018). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut secara berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89–96. <https://doi.org/10.31258/jkp.v9i2.7409>